

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

World Trade Organisation (WTO) atau organisasi perdagangan dunia menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan menyongsong tahun 2020. Lulusan lembaga pendidikan nasional dituntut mampu bersaing di dunia internasional. Implikasinya menjadi sebuah urgensi bagi setiap lembaga pendidikan dalam negeri, terutama perguruan tinggi, untuk meluluskan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas setara luar negeri. Setiawan (2016: 349) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia memang menjadi isu sentral di dalam lingkungan lembaga pendidikan sejak beberapa dekade terakhir. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan Indonesian *Qualification Frame Work* atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 sebagai pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang perjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kelulusannya agar sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Selama ini, masyarakat mengukur kehebatan lembaga pendidikan dari aspek keterserapan dunia kerja; semakin banyak lulusan memenuhi lapangan kerja, semakin sebuah lembaga pendidikan dianggap berkualitas. Ukuran ini terkadang tidak match dengan lembaga pendidikan dengan program studi yang memang tidak terkait langsung dengan lapangan kerja. Program studi ilmu sosial dan ilmu agama, misalnya, tidak bisa diukur kualitasnya semata-mata berdasarkan keterserapan lulusannya pada lapangan kerja. Jadi, ukuran kualitas yang dapat menjadi barometer lulusan ilmu-ilmu keagamaan yang bernaung di bawah Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam pandangan yang lebih komprehensif sepertinya belum ada (Syam, 2014: 12).

Berkenaan dengan kualitas, ada beberapa persoalan yang perlu menjadi catatan dalam tulisan ini. Pertama, tantangan kelembagaan dan kualitas lembaga. PTKIN sebagai bagian dari lembaga pendidikan dalam percaturan kehidupan global haruslah menyikapi era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Jika PTKIN ingin memainkan perannya dalam masyarakat global, tidak dapat tidak, PTKIN haruslah melebarkan sayapnya ke bidang sains dan teknologi tanpa memisahkannya dari nilai-nilai agama yang suci. Hal ini penting dilakukan untuk melahirkan generasi yang punya daya saing tinggi dan berkarakter. Tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh PTKIN dalam mengembangkan program studi atau jurusan. Akibatnya, akses ke perguruan tinggi oleh generasi muda sangat terbatas. Peningkatan status dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN tanpa diiringi dengan pembukaan program studi baru strategis tentu tidak banyak memberikan arti.

Kedua, PTKIN juga harus menghadapi tantangan politik anggaran. Secara umum, tantangan dalam pembangunan dan pengembangan PTKIN adalah masih rendahnya anggaran pendidikan di PTKIN yang notabeneberada di lingkungan Kementerian Agama dibandingkan dengan PTN yang berada di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Agar PTKIN dapat maju dan bersaing di kancah global sebagai World University, salah satu faktor yang perlu menjadi pertimbangan adalah politik anggaran yang berpihak kepada pendidikan. Walaupun dalam lingkungan Kementerian Agama telah ditanamkan nilai luhur untuk mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan melalui moto “Ikhlas Beramal”, faktor pendanaan tidak dapat dikesampingkan. Paling tidak, ke depan perhatian dalam melengkapi fasilitas pendidikan lebih ditingkatkan. Ketiga, tantangan yang dihadapi PTKIN adalah menyangkut *political will*. Walaupun berbagai teori dan fakta membuktikan tentang hebatnya kontribusi PTKIN dalam mempersiapkan generasi bangsa yang bersaing dan berkarakter, kurangnya komitmen yang kuat dan nyata dari politisi dalam bentuk kebijakan penganggaran yang proporsional bagi

PTKIN membuat kontribusi tidak maksimal. Karena itu, komitmen dari politisi yang membidangi anggaran sangat perlu ditingkatkan.

Bagi PTKIN sendiri, pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) akan terasa sangat menyulitkan ditinjau dari sudut minat. Seandainya minat masyarakat masuk ke PTKIN itu sama dengan animo masyarakat untuk masuk ke UI, ITB, Unair, IPB, UGM, atau PTN besar lainnya yang memang memanggul ilmu duniawi, mungkin saja kerisauan itu tidaklah sedemikian kuat. Akan tetapi, dengan kenyataan bahwa minat untuk studi *Islamic Studies* yang memang sedari semula kecil, yang dikhawatirkan adalah ketidakmampuan PTKIN untuk meng-*arrange* anggaran yang relatif besar sebagai konsekuensi memasuki penerapan UU Dikti.

Bagi perguruan tinggi yang sudah menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) juga memperoleh manfaat yang besar terkait dengan *generate income*-nya. Misalnya UI yang sebelum menjadi PT BHMN hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 200 miliar, setelah menjadi PT BHMN penghasilannya meningkat menjadi Rp 800 miliar. Demikian pula UGM yang meraup dana sebesar Rp 600 miliar. Di sisi lain, otonomisasi dan kemandirian bagi PTN yang bertujuan agar PTN mampu memobilisasi dana dari masyarakat yang juga merupakan buah dari UU Dikti, menjadikan PTKIN pontang-panting dalam mencari dana untuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di institusinya. Satu di antaranya disebabkan jumlah peminat untuk memasuki PTKIN relatif terbatas, kemudian kemampuan untuk mengakses anggaran dari masyarakat juga sangat terbatas. Padahal, menjadi perguruan tinggi berbadan hukum tersebut identik dengan kemandirian dan otonomi kelembagaan pendidikan tinggi yang secara kelembagaan harus memperoleh anggaran secara mandiri (Effendi, 2007: 1).

Pantaslah kemudian jika dikatakan kebijakan politik pemerintah hingga saat ini masih terasa sebagai politik belah bambu: menginjak yang bawah dan mengangkat setinggi-tingginya kalangan atas. Hal tersebut membuat PTKIN memiliki kendala dalam menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan. Dengan demikian, perluasan kewenangan serta peningkatan kualitas lembaga dan politik anggaran yang berpihak pada kemajuan

pendidikan perlu menjadi perhatian agar apa yang diharapkan oleh PTKIN, yakni menyiapkan lahirnya generasi yang memiliki kemampuan tinggi di bidangnya, mampu bersaing di tingkat global, serta memiliki karakter yang kuat dan lulusan yang berkualitas dapat diwujudkan.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa penerapan kurikulum yang berkualitas akan melahirkan lulusan yang berkualitas pula, pun sebaliknya. Namun, dalam fenomena yang penulis amati, masih banyak pelaku kurikulum di pendidikan tinggi, terutama dosen, yang belum menerapkan keempat komponen kurikulum tersebut secara holistik sehingga tidak heran jika terjadi kepingangan pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan ke depan yang makin kompleks, diperlukan suatu sistem kurikulum yang adaptif dan antisipatif terhadap tuntutan zaman, serta mudah diterapkan dalam praksis kependidikan. Kebijakan KKNi ini tentu harus dikelola sedemikian rupa, sehingga proses penjaminan kualitas lulusan lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Pada PTKIN, tingkat penerapan kurikulum mengacu pada KKNi masih beragam. Sebagian PTKIN baru pada taraf penyusunan Kurikulum KKNi melalui workshop pada tingkat fakultas dan pascasarjana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu mengkaji bagaimana penerapan kurikulum mengacu KKNi terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan PTKIN untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selaku pembelajar di Pendidikan Islam.

Berbicara masalah kualitas pendidikan, maka akan berkaitan erat dengan mutu pembelajaran. Mengenai mutu pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan lulusan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, maka kita harus memperhatikan mengenai beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pembelajaran.

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran merupakan hal yang teramat penting. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat. Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan

berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seseorang inovator, kemudian dikenalkan pada orang-orang yang akan membimbing tim dalam perjalanan melaksanakan program mutu.

Mutu menurut Partanto dan Dahlan (2014), merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Pendidikan perbuatan mendidik (Partanto dan Dahlan, 2014 : 505). Mengenai mutu pembelajaran ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, bahwa : “Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pembelajaran di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana.

Mutu pembelajaran dapat diartikan sebagai keadaan terpenuhinya berbagai standar pendidikan yang dihasilkan melalui proses pendidikan untuk memenuhi sasaran mutu pendidikan yang telah ditentukan. (Wiyani,N.A , 2020 : 15). Mutu pendidikan sesungguhnya ditentukan oleh mutu belajar, karena investasi pada manusia terletak pada mutu belajarnya (Satori, 2016:128). Masih menurut Satori bahwa Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu direpleksikan dalam proses pembelajaran yang bermutu. Salah satu pemikiran penting dalam manajemen pendidikan adalah bagaimana melakukan penjaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Satori, 2016:135).

Menurut Sri Minarti, Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: a) Hasil akhir pendidikan (Ultimate Outcome), b) Hasil langsung pendidikan (*Immediate Outcome*), c) Proses pendidikan, d) *Instrumen input*, e) *Raw input dan lingkungan* (Sri Minarti, 2016:335-336).

Penerapan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu bentuk kurikulum yang menjadi pilihan pemerintah untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian para

mahasiswa di Indonesia dalam menghadapi tantangan global di abad 21 ini, masa depan bangsa ini berada di pundak pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya pada Perguruan Tinggi. Kesadaran akan daya saing global yang kian hari makin ketat mengantarkan untuk menemukan sistem pendidikan yang dapat membekali keterampilan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah Islam secara profesional dan kompetitif bagi para alumninya. Penerapan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang optimal merupakan kebutuhan utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran demi menyongsong dan menopang laju perkembangan dunia akademik terutama di perguruan tinggi. Maka berkenaan dengan hal tersebut di pandang perlu adanya peningkatan kemampuan pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan teknologi, sehingga mampu menyediakan kebutuhan lapangan kerja dalam kancah Pasar Bebas (Afta) dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Dalam proses penerapan kurikulum secara garis besarnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari ketiga proses tersebut harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis serta IPTEK. Selain itu, penerapan kurikulum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi baik antara komponen-komponen kurikulum maupun relevansinya dengan tuntutan perkembangan IPTEK, juga perkembangan kebutuhan masyarakat, prinsip efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas.

Penerapan kurikulum yang mengacu KKNI merupakan amanat undang-undang yang harus segera di realisasikan pada setiap jenjang pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap Jurusan pada Perguruan Tinggi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun rencana kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi.

Hal tersebut sebagaimana undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum yang menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan Kurikulum yang mengacu KKNI bagi Setiap Jurusan perlu memperhatikan berbagai hal diantaranya terkait peningkatan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan yang menggunakan standar kurikulum yang mengacu pada KKNI.

Indikator dari kurikulum KKNI menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 adalah capaian pembelajaran, profil lulusan program studi, standar kompetensi lulusan learning outcomes, capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes/PLO), capaian Pembelajaran mata kuliah (Course Learning Outcomes/CLO), konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester).

KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang menjadi parameter mutu pendidikan tinggi. KKNI diatur secara khusus dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 8 tahun 2012. Namun, KKNI juga sering muncul dalam ketentuan umum peraturan menteri seperti halnya dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 Bab I pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonseia, selanjutnya disebut KKNI, disusun sebagai respons dari ratifikasi Indonesia tahun 2007 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*) yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. KKNI tersebut berguna untuk melakukan

penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNI. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia.

Posisi KKNI menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara. Karenanya, penyetaraan capaian pembelajaran di antara negara anggota ASEAN menjadi sangat penting. Selain itu, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kesiapan untuk menghadapi era di mana teknologi dan kecerdasan artifisial dapat menggantikan peran-peran manusia.

KKNI mempunyai 9 level, mulai dari level 1 (pendidikan dasar) hingga level 9 (Strata 3 / S-3). Tiap level harus benar-benar sesuai dengan levelnya, dalam arti tidak boleh level 6 (S-1) merasakan level 8 (S-2). Dalam kata lain, tidak diperbolehkan S-1 berasa S-2 dan sebagainya. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan pengembangan standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan berorientasi pada KKNI dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) pada tahun 2016 ini telah merancang sejumlah program terkait dengan pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Penerapan kurikulum pendidikan tinggi tersebut diharapkan dapat menghasilkan

lulusan-lulusan yang relevan dengan pembangunan nasional termasuk kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di dunia industri dan bermutu.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. “Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai Madrasah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan” (Yusuf, 2018 : 21).

Jadi yang dimaksud dengan mutu pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang sudah direncanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan juga merancang apa yang akan diajarkan kepada peserta didik, dengan tujuan mendapatkan hasil yang memuaskan seauai dengan apa yang diharapkan, yang indikatornya dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu prestasi dalam menempuh ujian semester ataupun prestasi dalam menempuh ujian akhir.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan di Indonesia umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya, maka diperlukan partisipasi aktif dan dinamis dari para pimpinan lembaga atau seluruh civitas akademik, para orang tua, mahasiswa, staf pengajar dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan lembaga pendidikan.

Lembaga Pendidikan perlu membentuk sebuah unit kerja yang bertugas melakukan penyusunan basis data dan profil lembaga pendidikan secara sistematis yang menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan. Semua proses ini harus dipantau secara teratur dan berkesinambungan sehingga akan terasa hasilnya. Informasi yang terangkum dengan sistematis tersebut selanjutnya diteruskan pihak lembaga pendidikan sehingga dapat memahami secara jelas pada posisi mana derajat kualitas pendidikan sebuah lembaga pendidikannya berada saat ini. Para konsultan menyajikan data secara terperinci sehingga para pengambil kebijakan di lingkungan lembaga pendidikan dapat mengambil keputusan penting yang menyangkut pembangunan konsep pendidikan dan arah rencana pendidikan ke depan yang akan dicapai.

Selama ini pembangunan pendidikan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan sedangkan faktor proses pendidikan kadang terabaikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka lembaga pendidikan harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kewenangan tegas untuk tidak membiarkan (*let go*) peserta didik yang tidak sanggup mengikuti pelajaran di kelas berikutnya perlu diterapkan sehingga mahasiswa yang berada pada level berikutnya adalah benar-benar seorang peserta didik yang sanggup untuk mencerna pengetahuan dan mengakses informasi.

Bagi pengelola PT, peningkatan mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan yang terus-menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu produk PT. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pelanggan selalu berubah dan dalam kinerja yang selalu mungkin masih mengalami kekurangan.

Menurut Jalal dan Supardi (2001) bahwa kebijakan program untuk peningkatan mutu pendidikan pada PT harus sesuai dengan relevansi pendidikan yang meliputi empat strategi yang harus ada, yaitu a) kurikulum, b) penyedia, c) tenaga ahli kependidikan, sarana pendidikan, dan d) kepemimpinan satuan pendidikan. Sedangkan Tampubolon (2002) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan PT dalam peningkatan mutu pendidikan adalah memiliki beberapa indikator, diantaranya: a) Menciptakan dan mengembangkan situasi Menang-Menang (*Win-Win Solution*), b) Menumbuhkan Motivasi Instrinsik, c) Peningkatan Mutu berkelanjutan, d) Menumbuhkan persaingan dalam konteks Kerjasama, e) Mencegah lebih baik daripada memperbaiki.

Untuk itu, Perguruan Tinggi perlu melakukan strategi perencanaan pembelajaran yang bermutu. Perkuliahan bermutu dimaksudkan adalah semua proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian (pelaksana rencana) materi

perkuliahan, evaluasi proses, produknya dan unsur-unsur yang terlibat dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan terutama mahasiswa maupun dunia kerja.

Senada dengan pernyataan di atas, maka berdasarkan informasi yang berhasil penulis rangkum pada saat melakukan pra penelitian, yaitu dengan observasi mengunjungi UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dan berdiskusi dengan Ketua Jurusan S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Manajemen Dakwah mengungkapkan bahwa, UIN merupakan kampus ternama di Jawa Barat yang mendapatkan nilai akreditasi A. Kemudian kedua jurusan di atas juga merupakan jurusan yang mendapatkan nilai akreditasi A. Jurusan S1 MPI dan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyiapkan para praktisi manajemen yang profesional baik dalam bidang Pendidikan Islam maupun dalam bidang Manajemen Dakwah (*Mudbir*) yang profesional. Manajemen tersebut khususnya dalam pelayanan pengelolaan pendidikan Islam di tingkat madrasah, majelis ta'lim, pengelolaan masjid, pengelolaan organisasi kemasyarakatan Islam, pengelolaan organisasi politik Islam, pengelolaan pelaksanaan ibadah haji, umrah, ziarah, pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, pengelolaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dakwah, dan pengelolaan lembaga keuangan Islam lainnya. Selain itu mahasiswa dan lulusan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah harus menjadi warga negara yang berkualitas dan mandiri serta mampu menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi dalam bidangnya masing-masing dalam kehidupan nyata di masyarakat (Wawancara, 3 Desember 2021).

Berangkat dari beberapa informasi yang berhasil penulis kumpulkan di lapangan pada pra penelitian, maka di dapat informasi awal mengenai penerapan kurikulum yang mengacu KKNi di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada dasarnya penerapan tersebut merupakan realitas dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Salah satu tujuan utama dari penerapan kurikulum yang mengacu KKNi di kedua Jurusan di atas bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu perguruan tinggi. Penerapan kurikulum yang mengacu KKNi di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

dan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat dijadikan sebuah model bagi perguruan tinggi lainnya jika penerapannya dianggap berhasil. Mengingat beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan dari hasil penerapan kurikulum tersebut yaitu sikap, tata nilai kemampuan penguasaan pengetahuan kewenangan dan tanggung jawab serta memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun salah satu bentuk keberhasilan seperti, adanya peningkatan kualitas mutu pendidikan dari kedua jurusan tersebut yang mendapatkan nilai akreditasi A. Indikator lainnya adalah mekanisme pelaksanaan Kurikulum KKNI di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipandang sudah memenuhi persyaratan dan selain itu pula ketersediaan sarana dan prasana penunjang dari kedua jurusan tersebut (Wawancara, 4 Desember 2021).

Yang menjadi pertimbangan penulis dalam meneliti pada kedua fakultas tersebut adalah bahwa kedua fakultas tersebut sangat berbeda dengan fakultas lain yang sama-sama menggunakan KKNI dimana secara global sangat mengedepankan pendidikan islam dan bersinergi dengan pengetahuan umum sehingga ada keseimbangan pada keduanya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jaman sekarang untuk memenuhi kebutuhan kerja yang berakhlakul karimah dan berbudi luhur. Namun, walau dari kedua prodi tersebut sudah dikatakan baik dengan akreditasi A, tetapi secara kuantitas berbeda dengan kualitasnya masih belum selaras pada realisasinya bahwa penerapan kurikulum yang mengacu KKNI di kedua prodi tersebut beberapa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan acuan KKNI. Hal ini diperlihatkan pada informasi yang diperoleh di lapangan dengan beberapa mahasiswa yang menunjukkan hal-hal tersebut dan masih ada beberapa dosen pada saat mengajar hanya terbatas pada memberikan pengetahuan hafalan, pemahaman dan aplikasi dari pemahaman pengetahuan tersebut, dan kurang menekankan pada aspek kognitif yang tinggi, seperti ketajaman daya analisis dan evaluasi, berkembangnya kreativitas, kemandirian belajar, dan berkembangnya aspek-aspek afektif (Observasi, 6 Desember 2020).

Adapun berdasarkan hasil observasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa: masih ada beberapa mahasiswa selama mengikuti perkuliahan hanya pasif, mereka datang kuliah tanpa bekal materi yang akan

dikuliahkan. Mahasiswa dikatakan memiliki prestasi tinggi, jika mahasiswa mempunyai banyak hafalan dan pemahaman pengetahuan yang diberikan dosen. Dan anehnya pengetahuan yang mereka miliki hanya sangat sedikit yang berguna dalam hidupnya maupun dalam menunaikan pekerjaan di kelak kemudian hari. Secara ekstrim dapat dikatakan telah terjadi pemborosan biaya, tenaga dan waktu yang luar biasa besarnya selama masa perkuliahan mahasiswa. Padahal dalam era komunikasi global ini, pengetahuan sangat mudah dicari. Sehingga semestinya dosen cukup memberikan fasilitas berupa permasalahan, dan memotivasinya untuk mencari pemecahannya dalam home page atau literatur lain yang ditunjuk/disediakan dosen. Selanjutnya masih ada beberapa Dosen telah terpolo dengan ilmu yang telah lama mereka kuasai dan dianggapnya sebagai ladang pekerjaan. Perubahan kurikulum tidak memberikan dampak pada perubahan materi ajar, tetapi hanya terbatas pada pergeseran nomor, nama dan klasifikasi mata kuliah saja (Observasi, 6 Desember 2020).

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah Manajemen bahwa, masih ada beberapa dosen yang tujuan perkuliahannya kebanyakan masih terbatas pada ranah kognitif level rendah. Sedangkan ranah kognitif level tinggi dan ranah afektif serta ranah psikomotorik masih terbengkelai, padahal ranah ini sangat penting dalam masyarakat ilmiah, kehidupan mahasiswa kelak maupun di dunia kerja setelah mereka lulus nanti (Wawancara, 6 Desember 2020).

Bertolak dari beberapa permasalahan tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan penelitian tentang penerapan kurikulum yang mengacu pada KKNI yang dituangkan dalam penelitian disertasi dengan judul : “Penerapan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Penelitian di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian yang difokuskan pada penerapan kurikulum yang mengacu KKNI pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung akan dikaji lebih detail melalui pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apa tujuan Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana Program Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut?
3. Bagaimana Proses Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut?
4. Bagaimana Evaluasi Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut?
5. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut?
6. Bagaimana Dampak Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI terhadap peningkatan mutu pembelajaran pendidikan tinggi pada kedua Jurusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tujuan penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Untuk menganalisis program penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut.
3. Untuk menganalisis proses penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut.
4. Untuk menganalisis evaluasi penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut.
5. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut.
6. Untuk menganalisis dampak penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Tinggi pada kedua Jurusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Penerapan Kurikulum yang mengacu KKNi sebagai kerangka acuan dalam menerapkan sebuah pola Kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum dengan ketercapaian Visi Misi dan Tujuan jurusan yang dituangkan kedalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) khususnya bidang Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam pengembangan kurikulum khususnya kepada:

1. Lembaga yang diteliti (jurusan MPI dan MD)

Yaitu penelitian ini sekiranya dapat dijadikan masukan bagi civitas akademika jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mengembangkan perangkat kurikulum khususnya terkait penerapan Kurikulum yang mengacu KKNI dan dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga lainnya. Selain itu juga sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam penyelenggaraan Penerapan Kurikulum, dalam merancang RPS, rancangan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcome* dan SKPI yang berkaitan dengan peraturan pemerintah pada jenjang pendidikan tinggi khususnya KKNI.

2. Jurusan

Yaitu penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan dan evaluasi dalam Pengembangan Kurikulum dalam konteks penerapan Kurikulum yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu KKNI.

3. Peneliti

Yaitu memperdalam wawasan pengetahuan serta menambah referensi peneliti mengenai penerapan Kurikulum yang mengacu KKNI pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Manajemen Dakwah (MD) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Kurikulum merupakan “jantung” institusi pendidikan atau sistem pembelajaran. Tanpa kurikulum proses pembelajaran menjadi tidak jelas arah dan orientasinya. Mengingat pentingnya kedudukan kurikulum dalam pendidikan, maka implementasi kurikulum sangat diperlukan selain disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga membawa perubahan yang sangat besar terhadap pola kehidupan manusia dan tuntutan dunia kerja. Pengembangan kurikulum juga sebagai upaya untuk membangun kompetensi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Fullan mendefinisikan implementasi kurikulum merupakan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah. Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam

tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya (Wasito H, 2011:5).

Kurikulum (*curriculum, al-manhaj*), yang secara bahasa berarti jalan yang jelas, tidak hanya berupa struktur mata pelajaran dan silabus, melainkan keseluruhan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang akan ditransformasikan melalui proses pendidikan, sehingga peserta didik mengalami perkembangan dan kemajuan ke arah terbentuknya pribadi yang berpikir rasional, berpengetahuan luas, bersikap positif, berketerampilan, dan berkepribadian sosial (al-Jabburi, 2013: 224).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka memberi pengakuan kompetensi kerja, sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector (Perpres No 8 tahun 2012).

Penyusunan KKNI mempunyai landasan legal yang tercakup didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagakerjaan (Dikti, 2010: 7).

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja (Dikti, 2010:16). KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara_negara lain. Kerangka kualifikasi secara umum disusun berjenjang dari terendah sampai ke yang tertinggi berdasarkan kemampuan bekerja, penguasaan pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan atau ketrampilan yang diperoleh melalui pelatihan.

Europa Qualifications Framework (EQF) sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNI, membagi jenjang kerangka kualifikasi dalam delapan tingkat dari jenjang pertama sampai jenjang delapan yang tertinggi (Cedefop, 2010:17). *EQF* menyepadankan jenjang kualifikasi dengan

jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandanginya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan *EQF*.

Pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru (Dikti, 2010:16). Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

Implementasi/ Pelaksanaan program KKNI melalui beberapa tahapan yaitu menyusun capaian pembelajaran, Merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan learning outcomes, perumusan capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes/PLO), perumusan capaian Pembelajaran mata kuliah (Course Learning Outcomes/CLO), menemukenali konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester), dengan rincian sebagai berikut;

Tahap Pertama, Menyusun capaian pembelajaran Universitas (University Learning Outcomes). Diturunkan dari visi dan misi universitas yang mengandung profil umum lulusan sebagai kompetitive dan comparative advantage dari universitas tersebut. Capaian pembelajaran universitas lebih menampilkan soft skill dibandingkan hard skill yang harus dimiliki lulusan universitas tersebut.

Tahap Kedua, Merumuskan profil lulusan program studi. Profil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan: lulusan seperti apa yang akan dihasilkan oleh program studi setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya (outcomes).

Tahap Ketiga, Perumusan Standar Kompetensi Lulusan. Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai outcome pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh

lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: “Untuk menjadi profil (.....yang ditetapkan) lulusan harus mampu melakukan apa saja?” Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap.

Tahap Keempat, Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (Program Learning Outcomes/PLO). PLO merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus program studi tertentu di perguruan tinggi.

Tahap Kelima, Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Course Learning Outcomes/ CLO). CLO dengan jelas menggambarkan apa yang akan mahasiswa ketahui dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran perkuliahan berbasis kinerja (performance) dan berorientasi pada hasil.

Tahap Keenam, Menemukan Konsep Kunci dan Kata Kunci pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Pernyataan konsep kunci (key concept) tidak dimaksudkan hanya untuk concept knowledge pada ranah pengetahuan Bloom, tetapi lebih ditekankan pada content knowledge dari setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Tahap Ketujuh, Pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester) Mengadaptasi pendapat Clark dan Lampert (1986) dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah determinan utama dari apa yang diajarkan. Kurikulum yang dipublikasikan, ditransformasikan, dan diadaptasikan dalam proses perencanaan dengan penambahan, penghapusan, interpretasi, dan keputusan dosen tentang kecepatan, urutan, dan penekanan (pengajarannya). Dalam perencanaan pembelajaran termasuk di dalamnya mengalokasikan waktu pembelajaran untuk individu-individu dan kelompok-kelompok mahasiswa; menyusun kelompok-kelompok mahasiswa; mengorganisasikan jadwal harian, mingguan, dan triwulanan; dan mengompensasi waktu untuk interupsi di luar kelas dan berkomunikasi dengan dosen pengganti.

Ketujuh tahapan tersebut di atas apabila diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan PTKIN maka akan dapat meningkatkan mutu PTKIN, artinya pengembangan kurikulum KKNI merupakan salah satu upaya pembaharuan pendidikan yang telah disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dan pendekatan dimulai dari menyusun rasional mengembangkan kerangka dasar dan pedoman pengelolaan kurikulum berbasis KKNI.

Faktor keberhasilan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI untuk mencapai peningkatan mutu PTKIN, tidak terlepas dari peran dan fungsi semua pihak unsur terkait antara lain unsur pimpinan yang ada di PTKIN, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dukungan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat bersama-sama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Semua system yang ada mempunyai rasa memiliki dan berkepentingan menjadikan PTKIN yang bermutu.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada mutu pembelajaran PTKIN adalah kurikulum yang memadai, serta hasil studi Heyman dan Loxley tahun 1989 faktor tenaga pendidik, waktu belajar, manajemen, sarana fisik dan biaya pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap prestasi belajar. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk penyelenggaraan proses dan isi (kurikulum) pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk dapat memenuhi kualitas dan prestasi belajar, dimana kualitas dan prestasi belajar pada dasarnya menggambarkan kualitas pendidikan (James H. Williams, 2021,37).

Adapun peningkatan mutu pembelajaran yaitu suatu rangkaian proses kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk memperbaiki kualitas atau mutu dari pembelajaran tersebut secara terus menerus dengan tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, guna memberi nilai tambahan pada hasil lulusan dari suatu lembaga pendidikan. Dan proses pembelajaran tersebut terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru yang akan

menyampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Mengutip dari buku Strategi Belajar Mengajar, Anissatul Mufarokah pembelajaran merupakan suatu system intruksional yang mengacu pada seprangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan, selaku suatu system pembelajaran meliputi suatu komponen antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, situasi dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerja sama. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja semisal metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan.

Membicarakan mengenai mutu pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan lulusan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, maka kita harus memperhatikan mengenai beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Siswa dan Guru
- b. Kurikulum
- c. Sarana dan prasarana pendidikan
- d. Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib dan kepemimpinan
- e. Pengelolaan proses pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pembelajaran
- f. Pengelolaan dana
- g. Evaluasi
- h. Kemitraan, meliputi hubungan sekolah dengan lembaga lain

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran merupakan hal yang teramat penting. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu prinsip-prinsip yang perlu dipegang

dalam menerapkan program mutu pembelajaran menurut Khairiah (2015:21), di antaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pembelajaran menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pembelajaran merupakan alat yang dapat digunakan oleh para professional pembelajaran dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.

2. Kesulitan yang dihadapi para professional pembelajaran adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang ada.

3. Peningkatan mutu pembelajaran harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para professional pembelajaran harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.

4. Mutu pembelajaran dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi.

5. Kunci utama peningkatan mutu pembelajaran adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam me-nyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.

6. Banyak professional di bidang pembelajaran yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan baru.

7. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para professional pembelajaran harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.

8. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan system pengukuran memungkinkan para professional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua, maupun masyarakat.

9. Masyarakat dan manajemen pembelajaran harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.

Dalam konteks penelitian ini agen perubahan diwakili kedua jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan dan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi jenjang S1 UIN SGD Bandung untuk menerapkan kurikulum yang mengacu KKNI. Hal tersebut juga merupakan kesempatan atau peluang emas bagi para pelaku pendidikan tinggi untuk berperan dalam proses pengelolaan perubahan institusi pendidikan tinggi secara profesional. Terlebih dalam menghadapi transformasi institut ke universitas, UIN SGD Bandung secara profesional dituntut untuk memperbaharui atau mengelola perubahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Menurut Balogun dan Hailey terbagi sifat perubahan ini dari hasil akhir dalam empat jenis perubahan mendasar. *Adaptation*, yakni perubahan non-paradigmatik yang diimplementasikan secara perlahan dengan inisiatif yang tetap. *Reconstruction*, yakni perubahan non-paradigmatik yang bertujuan untuk menyesuaikan cara organisasi bekerja, namun lebih dramatis dan cepat. *Evolution* yakni perubahan transformatif yang diimplementasikan secara gradual melalui tahapan-tahapan yang berbeda dan inisiatif yang saling berhubungan. *Revolution* yakni perubahan transformatif yang bersifat fundamental namun dalam inisiatif

yang terjadi secara simultan dan seringkali dalam waktu yang singkat (A. Ruhiat, 2014:207).

Manajemen perubahan ini diawali dengan beberapa tahapan awal yakni dengan melakukan identifikasi perubahan, perencanaan perubahan, implementasi perubahan dan evaluasi perubahan. *Pertama*, identifikasi yang dilakukan oleh organisasi dan disosialisasikan kepada seluruh anggotanya dengan tujuan supaya semuanya memahami terhadap kondisi perubahan yang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat. *Kedua*, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini, organisasi melakukan analisis terhadap situasi teknik dan pemlihan strategi umum. *Ketiga*, yakni tahap implementasi perubahan. Pada tahapan ini terjadi pelaksanaan perubahan dengan mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini pula, organisasi harus mempersiapkan perangkat analisis dan teknik penyelesaian masalah (*problem solving*). Hal ini dapat dilakukan pula dengan monitoring perubahan. Selanjutnya tahap evaluasi. Pada tahapan ini, organisasi melakukan semacam inventarisasi data atas implementasi perubahan yang dilakukan untuk kemudian dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya (Ruhiat, 2014:208).

Berkenaan dengan argumen teoritis di atas, maka dengan demikian dapat dirumuskan kerangka teoritis penelitian ini mencakup pada beberapa hal, diantaranya kurikulum dan bentuk format Kurikulum Yang mengacu Kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Implementasi kurikulum dan hasil yang didapat setelah adanya pengimplementasian kurikulum. Adapun proses implementasi kurikulum mencakup tahapan perencanaan, tahapan proses implementasi dan tahapan evaluasi. Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah *Outsome thing into effect* atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Selain itu, implementasi kurikulum diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran.

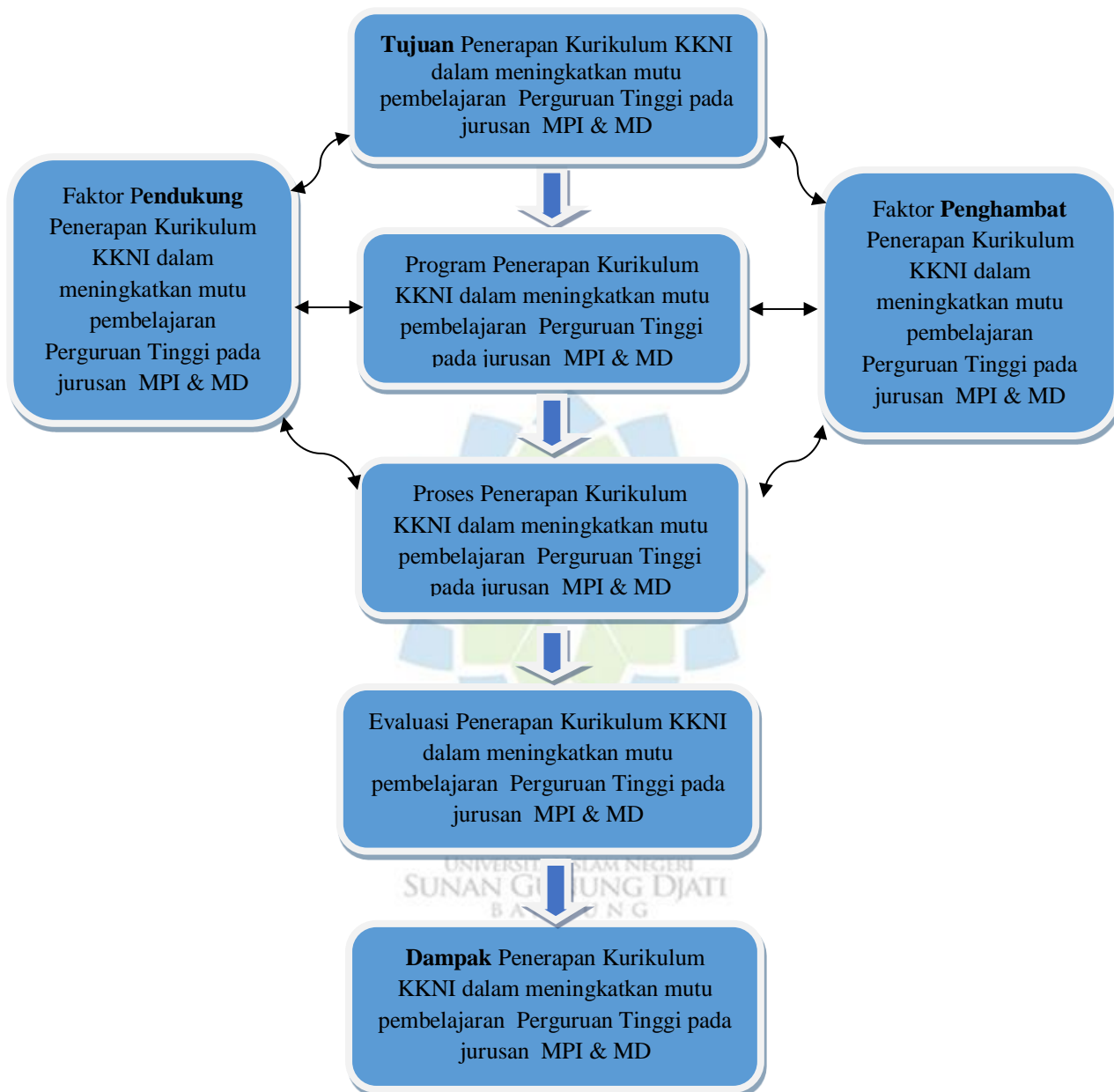
KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi (Perpers Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012). Adapun deskripsi

jenjang S1 memiliki kualifikasi yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya, dalam penjenjangan pendidikan sarjana pada KKNI Level 6. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Unsur terpenting pada setiap lembaga pendidikan yaitu kurikulum dalam setiap proses implementasi pembelajaran, karena kurikulum berfungsi dan berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam UU Nomor 20 tahun 2003.

Bagi Jurusan MPI dan MD adanya penerapan kurikulum berkompetensi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia diharapkan lulusannya dapat mengaktualisasikan *Soft Skills* dan *Hard Skills* yang dimilikinya dan mempunyai daya saing bagi kualitas lulusannya ketika terjun dan menghadapi Masyarakat penuh dengan tantangan, Lulusan tersebut tidak saja bisa menjadi da'iyah atau tenaga kerja yang menempati lapangan pekerjaan tertentu tapi lebih pada lulusan yang mampu memberikan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada era globalisasi abad modern dengan disertai bakat dan minat pada keilmuannya. Kemampuan menyelesaikan memberikan solusi pada setiap permasalahan secara bertanggung jawab diharapkan di masyarakat dapat menjadi nilai plus bagi lulusan pendidikan jurusan Manajemen Dakwah fakultas Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selalu siap ketika harus bersaing menghadapi era globalisasi abad modern di masa kedepannya.

Secara skematik alur pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 1.2 berikut.

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
Penerapan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai pendukung, pembanding serta penambah wawasan dalam penelitian, juga sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Topik penerapan kurikulum mengacu pada KKNI untuk meningkatkan mutu pembelajaran telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat penelitian yang relevan dengan

penelitian penulis. Dalam penelitian ini akan dipaparkan lima hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Adapun ke lima penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nur Afifah, 2020. “Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Studi pada Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dasar KKNI dan SN Dikti menjadi acuan pengembangan kurikulum secara yuridis, deskripsi desain pengembangan serta rencana implementasi kurikulum yang mengacu KKNI dan SN Dikti pada Jurusan Pendidikan Agama Islam. Kelemahan penelitian ini hanya dilakukan pada satu Jurusan yang dijadikan objek penelitiannya sehingga tidak bisa dikomparatifkan.

2. Nur Hasanah, 2016. “Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Kurikulum Yang mengacu KKNI (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon)”. Disertasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kurikulum yang mengacu KKNI akan diterapkan pada semester gasal TA 2015/2016, dan Sumber Daya Manusia telah siap untuk dilaksanakan implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI.

3. Lian G. Ota, 2020. “Pengembangan Kurikulum Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Yang mengacu KKNI dalam Keterserapan Lulusan pada Dunia Kerja (Studi pada IAIN Sultan Amai Gorontalo)”. Disertasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Penelitian ini membahas arah pengembangan kurikulum yang mengacu KKNI pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, kesetaraan lulusan dalam dunia kerja. Untuk menjawab kebutuhan pasar, maka visi Jurusan ini adalah “menjadi Jurusan yang handal, inovatif,

bermartabat dalam menyiapkan tenaga manajerial kependidikan yang profesional dan berkarakter islam di Sulawesi pada tahun 2020”.

4. Muhammad Ardy Zaini. 2017. Pengembangan Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (Studi Kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”. Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Zaini membandingkan dan menganalisis SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan distribusi mata kuliah pada kedua Jurusan tersebut sehingga diketahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing Jurusan.

5. Eko Wahyu Nugrahadi, dkk. 2018. *Analisis Implementasi Kurikulum Yang mengacu KKNi Di Fakultas Ekonomi UNIMED*. Jurnal Niagawan Vo.7, No.1.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa : (1) secara keseluruhan terdapat dosen pengampu mata kuliah yang tidak memberikan secara lengkap 6 (enam) jenis tugas (4,41%) dan tugas RI merupakan jenis tugas yang banyak jumlah tidak diberikan dosen, (2) Ditinjau dari masing-masing prodi, terlihat bahwa hanya program studi Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang dosennya secara lengkap telah memberikan 6 (enam) jenis tugas, (3) Secara keseluruhan dosen dalam menjelaskan cara mengerjakan tugas dikategorikan pada level dipahami mahasiswa (90,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (4) Secara keseluruhan sumber referensi yang diberikan dosen pada saat perkuliahan berlangsung dikategorikan relevan (92,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (5) Secara keseluruhan dosen menjelaskan rubrik penilaian pada saat perkuliahan berlangsung dikategorikan pada tingkat dipahami (83,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (6) Secara keseluruhan masih terdapat dosen yang belum secara jelas menetapkan waktu pengumpulan tugas, sedangkan ditinjau dari masing-masing prodi hanya

dosen-dosen prodi Manajemen yang telah memberikan kejelasan waktu pengumpulan tugas.

Dari penelitian di atas ditemukan bahwa dosen tidak sepenuhnya memberikan tugas dan ditinjau dari Jurusan, hanya Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang dosennya secara lengkap memberikan tugas. Bedanya penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada Penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

